

KONTRARADIKALISME DALAM PERSPEKTIF MEDIA SIBER DI INDONESIA

Arif Budi Prasetya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
arif.prasetya@ub.ac.id

Article Information

Submitted :
March 28th,
2022

Accepted : July
26th, 2022

Abstract

The issue of radicalism that occurred in several regions in Indonesia had a significant impact, especially on the psychological aspect of society. Fear of terror acts after the Bali Bombings I and II, as well as several acts of terror, made the government enforce special rules in its agencies. Studies related to anti-radicalism are reported by the media through various perspectives. This policy is part of the government's efforts to prevent radicalism in the territory of state agencies. Not only conventional media, but digital media also do the same. The focus on digital media in this research (hereinafter referred to as cyber media is inseparable from the advantages of these media which have unlimited access. Another interesting aspect is seeing how the construction of cyber media on this phenomenon provides a separate picture of media opinions regarding anti-terrorism and anti-terrorism). radicalism launched by the government. By using framing analysis, it will be known how cyber media makes a construction of the government's efforts in tackling terrorism and radicalism in society as well as making a real contribution to the government to form comfort in social life in society. Other studies in this research also can be used as further research related to the handling of radicalism as well as the practice of terrorism.

Keywords: Antiradicalism; new media; cyber media ; framing; government

Abstrak

Isu radikalisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia memberikan dampak yang signifikan, terutama aspek psikologis masyarakat. Ketakutan akan adanya aksi teror pasca Bom Bali I dan II, serta beberapa aksi teror, membuat pemerintah memberlakukan aturan-aturan khusus di instansinya. Kajian terkait anti radikalisme diberitakan oleh media melalui perspektif yang beragam. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menangkal adanya radikalisme di wilayah instansi Negara. Tidak hanya media konvensional, namun media digital juga melakukan hal yang sama. Fokus terhadap media digital dalam riset ini (yang selanjutnya akan disebut sebagai media siber tidak terlepas dari keunggulan media tersebut yang memiliki akses tidak terbatas. Aspek menarik lainnya dengan melihat bagaimana konstruksi media siber terhadap fenomena ini memberikan gambaran tersendiri tentang opini media mengenai anti terorisme dan anti radikalisme yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan analisis framing, akan diketahui bagaimana media siber membuat sebuah konstruksi terhadap usaha pemerintah dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme di masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah untuk membentuk kenyamanan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kajian lainnya dalam riset ini juga bisa digunakan sebagai riset lanjutan terkait dengan penanganan terhadap radikalisme sekaligus juga praktik terorisme.

Kata Kunci : Antiradikalisme, New Media, Media Siber, Framing, Pemerintah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sekaligus perubahan struktur sosial di masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi komunikasi yang mendasar terciptanya pola komunikasi di masyarakat tidak terlepas dari kultur. Munculnya system pemberitaan yang membahas peristiwa di masyarakat merupakan tugas dari media, dan tentunya dalam kasus kali ini adalah media digital yang menjadi pokok pembahasannya. *“Technology has been transforming the media industry over the past two decades.”* (Zhou, Matsaganis ; 2019) Pemberitaan mengenai terorisme, yang dibahas dalam penelitian sebelumnya memberikan gambaran bagaimana fenomena tersebut terjadi di Indonesia sejak era tahun 1980. Kemudian pada era reformasi, diskusi mengenai terorisme lebih merujuk pada organisasi masyarakat yang berlatar belakang agama Islam. Hal ini merupakan efek dari adanya peristiwa Bom Bali I yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya. Hasil penelusuran polisi dan media ditemukan bahwa pelaku-pelaku tindakan teror tersebut memiliki paham Islam yang radikal. Aspek yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam (menurut mereka) merupakan bentuk kekafiran dan harus diberantas. Selain itu, masih dari hasil penelusuran kepolisian juga, rata-rata pelaku tindakan teror pernah tinggal dan menetap di Negara-negara konflik seperti Afghanistan, Iraq dan Suriah. Pemandangan peperangan dan korban-korban perang yang mayoritas Islam menjadi gambaran untuk dijadikan doktrin hingga berpaham radikalisme seperti saat ini.

Selain itu, pemberitaan yang dilakukan oleh media digital melalui platform portal media seperti detik.com maupun kompas.com menjadi objek yang memberikan wahana pengetahuan dan cakrawala baru. Sebab, gambaran tentang terorisme menjadi sangat subjektif serta terkonstruksi sedemikian rupa yang berujung pada terbentuk stigma di masyarakat. Keterkaitan antara simbolisasi dengan pemberitaan di media dapat dilakukan dalam ranah penggunaan bahasa yang terurai melalui kata dan kalimat yang digunakan. Selain itu, konsep kajian ini pada dasarnya juga berada dalam beberapa wilayah kajian lainnya, misalnya semiotika. Kajian mengenai semiotika sudah lama diperbincangkan dan merupakan diskursus yang menitikberatkan pada system penandaan dan makna yang terdapat dalam sebuah symbol. Dalam perspektif ilmu komunikasi, semiotika memegang peranan penting untuk melihat bagaimana symbol digunakan untuk berkomunikasi. *“Konsep pemaknaan ini tidak terlepas dari perspektif dan nilai-nilai ideologis serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran masyarakat dimana symbol tersebut digunakan.”* (Prasetya, 2019 : 5). Hal ini menandakan bahwa pemikiran yang bersumber dari simbolisasi di masyarakat tidak terlepas dari konstruksi budaya di masyarakat.

Dalam perspektif penelitian ini, semiotika yang berlaku adalah semiotika post strukturalis. *“Semiotika dalam pandangan post strukturalis tidak lagi menaruh perhatian pada system tanda-tanda, melainkan dengan pembentukan subjek serta peranannya dalam perubahan bahasa.”* (Piliang, 2011 : 260). Dengan memperhatikan aspek subjektifitas dan perspektif semiotika post strukturalis, pemberitaan yang dilakukan oleh media-media digital dapat dianalisis dari segi bahasa media. Konsep terorisme yang menjadi aspek utama dalam penelitian ini diambil dari perkembangan media digital dan internet. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap aspek pemerintahan di Indonesia.

Dalam membicarakan diskursus Anti-Teror, kita tidak bisa melepaskannya dengan diskursus Teror itu sendiri. Karena, bagaimanapun, diskursus anti-teror tidak muncul secara tiba-tiba di tengah masyarakat. Kemunculannya juga harus dipahami sebagai respon dari diskursus yang sebelumnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa diskursus anti-teror merupakan produk dari diskursus teror itu sendiri. Ia selalu ada dan menjadi antitesa dimana diskursus teror diproduksi. Dalam perkembangannya di Indonesia, diskursus anti-teror mulai muncul pada masa reformasi, yaitu tahun 2002. Sejak terjadinya aksi terorisme terbesar pertama di Indonesia, pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali. Kejadian tersebut menjadi titik penting yang menandai kesadaran bahwa, diskursus anti-teror harus

mulai diganggu. Tentunya, sebagai respon dan perlawanan untuk meredakan diskursus teror yang juga mulai berkembang di media digital. Dengan demikian, diskursus anti-teror memulai perannya untuk mereduksi ketakutan masyarakat akan aksi teror melalui media massa.

Berbicara mengenai anti radikalisme atau anti terorisme maka kita akan berbicara pula banyak hal terkait dengan peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di wilayah Indonesia. Kasus Bom Bali I tahun 2002 yang merenggut nyawa hingga 202 korban meninggal, memberikan dampak psikologis bagi masyarakat. Hal ini kemudian berlanjut dengan berbagai kasus bom di wilayah-wilayah yang lain yang mengakibatkan banyak korban pula. Menanggapi hal tersebut, pemerintah di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan undang-undang terkait dengan terorisme dan radikalisme. Dalam perspektif media, langkah yang dilakukan oleh pemerintah memberikan gambaran mengenai usaha untuk mencegah terjadinya aksi teror di masyarakat. Walaupun pada realita yang terjadi, aksi teror masih terjadi meskipun dalam skala yang lebih kecil.

Diskusi mengenai isu terorisme dan anti radikalisme pasca reformasi banyak dilakukan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini memunculkan suatu pembahasan menarik ketika dikaitkan dengan peran media dalam melakukan pemberitaan tentang aksi teror tersebut. Tidak jarang pula memunculkan berbagai hal seperti stereotip. *“Stereotypes render the text significant, resonant, and meaningful for the national audience just like “a cultural device” generally does (Schudson, 1989 dalam Tanikawa, 2022).”* Stereotip sering muncul karena peran media yang membentuk konstruksi di masyarakat, terutama terkait dengan terorisme dan radikalisme. Kajian media tentang isu radikalisme memberikan gambaran bahwa paham radikal harus ditangkal sedini mungkin. Aspek menarik selanjutnya adalah melihat bagaimana kemudian media memiliki sudut pandang tersendiri terhadap anti radikalisme. Berbagai media mainstream maupun digital memiliki konsep pandangannya tersendiri terhadap kasus terorisme di Indonesia. “

Salah satu pembingkai yang cukup menarik yang dilakukan oleh media adalah tentang usaha pemerintah dalam menangkal paham radikalisme sejak bangku sekolah. Pasca kasus bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga di Surabaya, berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan kepolisian dalam mempersempit ruang gerak bagi anggota-anggota organisasi masyarakat berpaham radikal. Selain itu, isu beredarnya paham khilafah yang masuk ke lingkup perguruan tinggi, tidak luput dari perhatian pemerintah dalam usahanya menangkal paham radikal.

Salah satu konsep menarik yang bisa diambil dari hal tersebut adalah bagaimana peran media dalam melakukan pemberitaan. Konsep media massa sebagai salah satu pilar kekuatan dalam informasi di masyarakat telah merubah wajah dan realita sosial. Media massa menjadi sebuah ‘sosok’ yang ‘berkuasa’ di tengah masyarakat. Kekuatan media massa dalam melakukan pengaruh telah banyak diperbincangkan dalam diskusi-diskusi ilmiah. Apabila ditarik ke dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi, kita bisa mengambil pemikiran dari Everett M. Rogers, yaitu: membagi perkembangan teknologi komunikasi menjadi 4 (empat) era, yaitu :

1. Writing Era
2. Printing Era
3. Telecommunication Era
4. Interactive Communication Era

Writing Era merupakan era atau masa di mana manusia mulai mengenal tulisan. Era ini, menurut Rogers, merupakan bentuk penemuan aktualisasi diri manusia yang menemukan cara berkomunikasi baru dengan menggunakan symbol-simbol yang disebut huruf. Orang Mesir kuno menggunakan lambang-lambang yang disebut *hieroglyph* sebagai bentuk komunikasi mereka melalui tulisan. Bangsa Cina juga mengenalkan tulisan pertama kali dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Perkembangan tulisan mengalami evolusi yang dinamis hingga kita mengenal huruf alphabet seperti sekarang ini.

Printing Era ditandai dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Penemuan mesin cetak ini menandai dimulainya era teknologi komunikasi. Teknologi pertama yang menjadi batu loncatan adalah mesin cetak Gutenberg ini. Dengan menggunakan mesin ini, Gutenberg menyebarkan surat-surat pengampunan dosa yang controversial tersebut. Mesin tersebut kemudian berkembang menjadi mesin cetak surat kabar, di mana surat kabar pertama di dunia adalah *Penny Press*. Disebut *Penny Press* karena waktu harganya hanya 1 penny, dan berisi satu berita saja. Dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg tersebut, perkembangan media massa menjadi pesat, terutama di bidang media cetak. Semakin hari media cetak semakin bertambah banyak. Berita yang dimuat dari yang awalnya berisi berita-berita keagamaan, pesan raja, mulai bertambah dengan dimuatnya berita-berita yang berkaitan dengan fenomena sosial. Hingga saat ini, media cetak yang kita nikmati setiap harinya merupakan hasil evolusi media cetak jaman dahulu. Koran menjadi seperti sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat dunia modern saat ini.

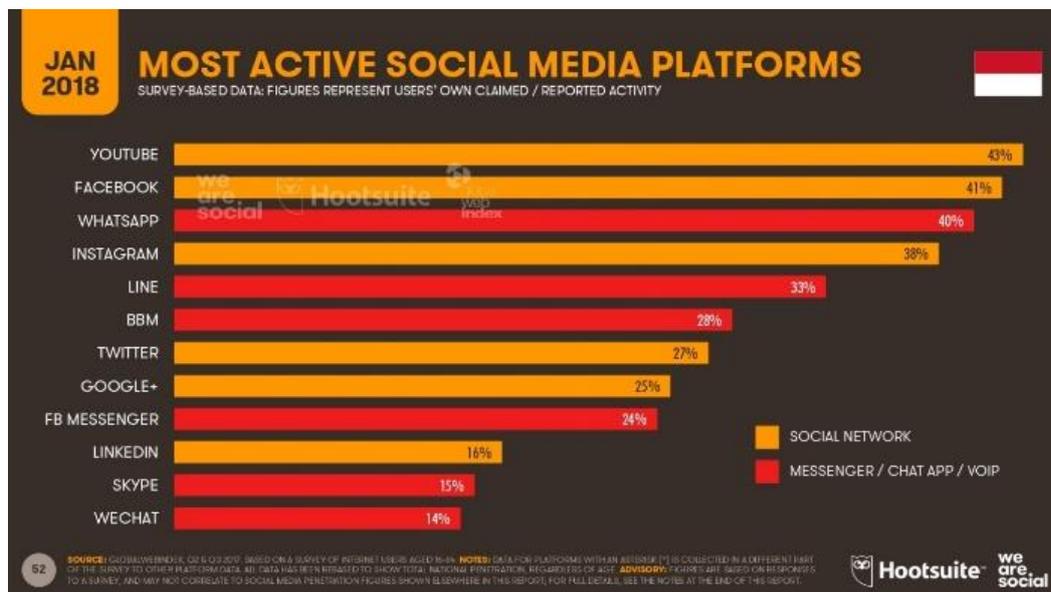
Telecommunication Era merupakan era dimana perkembangan teknologi komunikasi mengalami jaman keemasan. Era ini ditandai dengan mulai ditemukannya alat komunikasi elektronik jarak jauh. Alexander Graham Bell menemukan telegraf dan telepon, Guglielmo Marconi menemukan radio, dan Philo T Fansworth menemukan televisi. Penemuan televisi dianggap sebagai loncatan paling besar dalam dunia teknologi komunikasi, sebab televisi menjadi salah satu media massa yang paling digemari masyarakat karena mampu menghadirkan audio visual. Acara yang disajikan juga semakin beragam. Pada tahun 1928 *General Electronic Company* mulai menyelenggarakan acara siaran televisi secara regular. (Ardiyanto, 2007 : 136).

Interactive Communication Era merupakan era terakhir menurut Rogers, di mana ini merupakan era pengembangan dari era telekomunikasi. Era ini ditandai dengan ditemukannya internet sebagai media baru (*new media*). Internet dikatakan sebagai *new media* karena sampai saat ini tidak bisa didefinisikan secara konkrit. Internet juga merupakan bentuk dari konvergensi media, yaitu dua bentuk media yang disatukan ke satu bentuk media. Era terakhir ini juga menandakan bahwa teknologi komunikasi semakin canggih. "*In digital divides research, the term infrastructure has been used primarily to refer to the purely technical facets of Internet access, such as equipment and Internet connections (e.g., Barzilai-Nahon, 2006; Dutton, Gillett, McKnight, & Peltu, 2004; Rogers, 2001 dalam Grosej, 2021).*"

Praktik diskursif media massa dan kekuasaan media menjadi bagian tersendiri dalam dinamika masyarakat. Melalui kemampuannya (khususnya televisi dengan aspek audio visual) telah membius masyarakat untuk mempercayai setiap bentuk informasi yang ditayangkan oleh media massa. "*Furthermore, trust in news media plays an important role in complex societal structures, as it enables citizens to access vital information about politics and social life despite their limited knowledge and resources (Kohring & Matthes, 2007 dalam Stubenvol et. Al 2021)*". Bisnis media massa, sebagaimana kita ketahui saat ini telah merajai dunia bisnis dan menjadi dominasi di kalangan masyarakat. Para pemilik media telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah untuk menjalankan bisnis media massa di suatu negara, sehingga konsumen media massa ikut terpengaruh oleh kondisi semacam ini. Konsumen dihadapkan pada bentuk-bentuk pilihan tayangan media massa yang semakin beragam dan tentunya kebutuhan tayangan yang objektif menjadi pilihan yang sulit. Melalui kekuatan media tersebut, konsep pemberitaan anti radikalisme yang disebarkan kepada masyarakat akan memiliki impact tertentu.

Merujuk pada konsep tersebut maka kita berada dalam tataran yang disebut dengan framing media. Framing media merupakan bentuk media dalam membingkai suatu realitas tertentu. Di sisi lain, Entman menyebut framing sebagai "konseptualisasi yang tercerai berai" karena tidak adanya definisi konseptual yang jelas dan bergantung pada konteks secara spesifik, tidak aplikatif untuk operasionalisasi secara umum. Disisi lain, konsep framing dioperasionalkan dengan kombinasi agenda setting dan priming. Namun, McComb, Shaw dan Weaver (1997) menyarankan bahwa agenda setting dan framing tidak hanya saling berhubungan, framing sesungguhnya adalah perpanjangan tangan dari agenda setting (Scheufelle, 1999 : 103). Penekanan terhadap media digital dikarenakan persebarannya yang sangat massif, serta pengaruh yang diberikan juga kuat. Opini

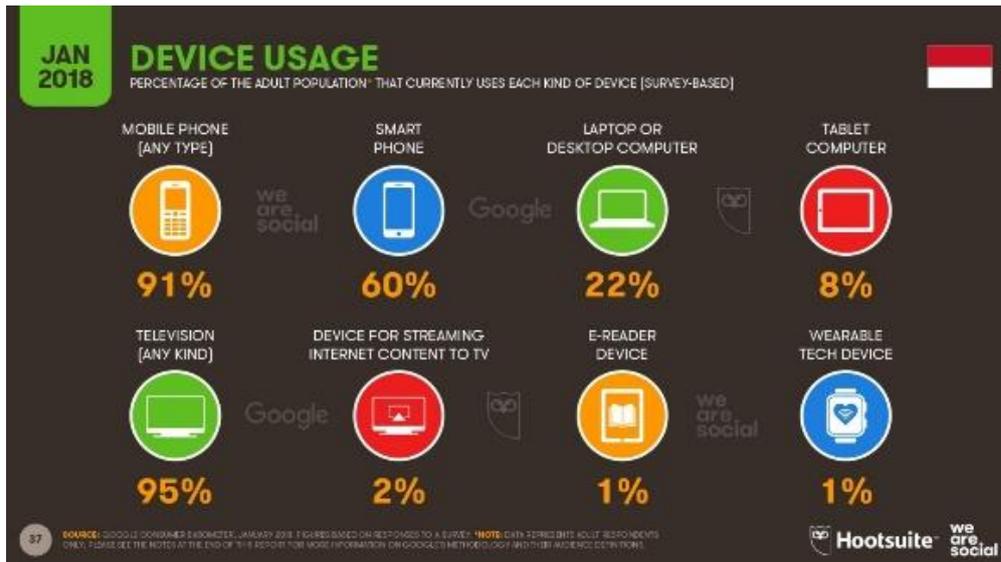
tersebut didukung dengan jumlah pengguna media digital yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut data Hootsuite Release Indonesia Digital Landscape



Gambar 1 : Hootsuite Release Indonesia Digital Landscape tahun 2018

Sumber : global web index Q2 and Q3 2017.

Data diatas menunjukkan bahwa pengguna media digital dalam bentuk platform media sosial semakin bertambah. *“Social media have changed how individuals exchange information, communicate with one another, and even conduct business.” (Tandoc, JR. Edson C, et.al 2021).* Hal ini juga memberikan peluang untuk semakin terbarnya informasi. Selain itu, konsumsi media digital juga semakin meningkat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. *“As for media digitalization, since the 1990s, all media in countries with a high level of Internet consumption have been affected by a gradual process of digital convergence, which has resulted in many changes in the economic model of media companies; the consumer’s channels and patterns; the organization of enterprises; the production, distribution, and consumption of news; and in many more aspects of journalism and convergent culture (Jenkins, 2006 , Ferre-Pavia et al, 2018)”*. Bahkan, menurut beberapa berita baik nasional maupun internasional, persebaran paham radikal sering terjadi melalui pertukaran informasi di media sosial. Selain platform media sosial, persebaran informasi radikal juga merambah penggunaan jenis media lain walaupun masih dalam tataran digital. Pengguna jenis media lain dalam tataran digital juga menyentuh hingga jutaan pengguna. Berikut data penggunaanya :



Gambar 2 : Device Usage

Sumber : google consumer barometer 2018

Melihat fenomena tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pengguna media digital semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah komunikasi yang tanpa batas dan transnasional. *“Because the Internet is, by definition, borderless and transnational, it seems reasonable to argue that online interactions, and, more specifically, those occurring on a digital platform such as Twitter, could generate transnational interactions”* (Ruiz-Soler, 2020). Namun hal itu tidak disertai dengan sebuah edukasi yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan yang terjadi justru adalah banyak ditemukan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan realitas yang ada, atau istilahnya adalah hoax. Rendahnya literasi media digital di masyarakat Indonesia ini menambah resiko terhadap munculnya paham-paham radikal yang disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Hal ini terjadi disebabkan oleh semakin maraknya penggunaan media sosial, disertai dengan rasa keingintahuan yang tinggi di kalangan masyarakat. Dengan semakin mudahnya masyarakat mencari informasi, hal ini semakin membuat masyarakat penasaran dengan hal-hal tertentu. Fasilitas yang diberikan oleh teknologi dalam memberikan informasi membuat kebutuhan masyarakat ‘harus’ dipenuhi. Keberadaan internet sebagai ‘media pemenuh kebutuhan’ masyarakat menjadi primadona saat ini. Internet sebagai mesin pencari (*search engine*) seolah telah menjadi wadah rujukan mengenai berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. *“Mesin pencari secara esensial adalah sebuah indeks atau katalog dari konten di Web dan jelas bukan konsep yang benar-benar baru, bahkan dengan fitur pencarian yang ditingkatkan.”* (McQuail, 2011 : 118).

Melihat penjabaran di atas dapat diketahui bahwa kekuatan media digital dengan kedekatannya terhadap masyarakat memberikan fenomena tersendiri. Dalam perspektif ini kita bisa memiliki asumsi bahwa media juga melakukan praktik otoriter atau rezim dalam aspek informasi. *“The media regime concept brings two advantages. First, it offers far more scope to situate an event or process as conjunctural—as an intersection of macroeconomic, geopolitical, and cultural trends; mesolevel actions by specific institutions and organizations; and micro-level individual behaviors.”* (O’Loughlin, 2020) . Apalagi ketika kita berbicara mengenai konsep terorisme dan radikalisme di masyarakat. Peristiwa yang terjadi di Indonesia mulai Bom Bali I hingga Bom JW Marriott, kemudian diteruskan dengan munculnya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) memberikan gambaran tersendiri mengenai semakin bermunculannya organisasi-organisasi terorisme di dunia. Melihat hal tersebut, pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait mulai menggalang program untuk memberantas paham radikalisme di masyarakat. Tentunya program ini memiliki nilai berita tersendiri di kalangan industry media, baik konvensional maupun digital.

Program antiradikalisme dan terorisme ini apabila dipandang dari perspektif media akan memiliki konstruksi sendiri. Namun, konstruksi yang secara spesifik terjadi di media digital menjadi focus utama dalam riset ini. Hal ini

dikarenakan media digital atau media siber memiliki keunggulan yaitu kedekatan dengan masyarakat serta kemudahan akses yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga konstruksi yang dibentuk dapat memberikan pengaruh dan pembentukan opini public yang lebih efektif. Pemilihan dua portal media sebagai representasi media siber dalam riset ini ditujukan kepada : detik.com dan kompas.com.

Alasan pemilihan dua portal media tersebut karena dianggap sebagai dua portal media dengan peringkat 5 besar di Indonesia versi alexa.com. Untuk dapat melihat bagaimana konstruksi yang terbentuk oleh media siber disebut, riset ini menggunakan teknik analisis Framing dengan model Robert Entmann. *“The concept of framing emerged from studies that seek to explain how individuals manage to process the large number of stimuli they confront based on efficient strategies.”* (Schermann, 2021). Selain itu, posisi analisis atau teori framing memang memberikan kajian empiris yang sesuai ketika melihat konstruksi yang dilakukan oleh media. *“Frames constitute the ways journalists organize information for audiences (Gitlin, 1980). A frame is described as being like a picture that includes some aspects of reality, but leaves out others, leading people to focus on certain elements and not consider others (Entman, 1993 dalam Coleman 2020).”* Model Entmann dianggap mampu untuk melihat konstruksi media siber dikarenakan terdapat aspek *define problem* dan *make moral judgement*. Melalui dua aspek tersebut dapat dilihat konstruksi seperti apa yang akan dibentuk oleh media. *“Framing refers to the process of highlighting certain dimensions of an issue or phenomenon “in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation”* (Entman, 1993, p. 52 dalam El – Nawawy, 2022). Adapun model analisis Framing Robert Entmann adalah sebagai berikut :



Gambar : Model Analisis Framing Robert Entmann

Sumber : olahan peneliti

Diskusi mengenai paham radikalisme di Indonesia muncul sejak awal tahun 1985, ketika peristiwa peledakan Candi Borobudur, yang dilakukan oleh dua terduga teroris Abdulkadir bin Ali Alhabsyi dan Husein bin Ali Alhabsyi. Namun, isu tentang radikalisme di Indonesia sendiri sudah terjadi semenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang tersaji adalah munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan DI TII di beberapa wilayah di Indonesia. Pemberontakan yang terjadi tidak hanya berlandaskan dengan paham penegakan syariat Islam, namun juga lebih sering muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu.

Kemudian pada era reformasi, diskusi mengenai terorisme lebih merujuk pada organisasi masyarakat yang berlatar belakang agama Islam. Hal ini merupakan efek dari adanya peristiwa Bom Bali I yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya. Hasil penelusuran polisi dan media ditemukan bahwa pelaku-pelaku tindakan teror tersebut memiliki paham Islam yang radikal. Aspek yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam (menurut mereka) merupakan bentuk kekafiran dan harus diberantas. Selain itu, masih dari hasil penelusuran kepolisian juga, rata-rata pelaku tindakan teror pernah tinggal dan menetap di Negara-negara konflik seperti Afghanistan,

Iraq dan Suriah. Pemandangan peperangan dan korban-korban perang yang mayoritas Islam menjadi gambaran untuk dijadikan doktrin hingga berpaham radikalisme seperti saat ini.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia mulai mencanangkan beberapa program dalam menangkal radikalisme di masyarakat yang dimulai di lingkup instansi pemerintahan. Wacana yang berkembang ini dalam beberapa waktu menjadi komoditas menarik bagi media untuk memberikannya dalam berbagai sudut pandang. Selain itu, konsep antiradikalisme yang ditekankan oleh pemerintah memiliki berbagai aspek menarik untuk dikaji, salah satunya adalah pertimbangan mengenai kondisi kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Sehingga polemic pro dan kontra yang terjadi merupakan hal yang lazim karena opini public yang berkembang di masyarakat.

Namun sebelum menuju pada konsep yang lebih berfokus pada diskursus mengenai antiradikalisme dan antiterorisme di masyarakat serta bagaimana konstruksi yang ditimbulkan oleh media siber, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu antiradikalisme dan antiterorisme. Ketika perkembangan teknologi menjadi sedemikian pesat, berbagai macam informasi juga berkembang mengikuti teknologi tersebut. Sehingga arus informasi menjadi semakin tak terbendung. *"The credibility of news stories, a focus of study by the scientific community for decades, has traditionally been analyzed from three perspectives: credibility of the source, credibility of the medium, and credibility of the content."* (Besalu, et.al 2021) . Ketika informasi mengenai aspek radikalisme mulai muncul di masyarakat, berbagai macam pendapat berupa penerimaan dan penolakan mulai bermunculan. "Radikalisme sendiri dapat diartikan sebagai fanatisme atau pemutlakaan terhadap suatu keyakinan dan sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya atau melawan keyakinan pihak lain (seringkali dengan menggunakan cara-cara kekerasan)." (dikutip dari cpps.ugm.ac.id/anti-radikalisme-prospek-demokrasi-oleh-muhadjir-darwin/). Konsep pemutlakan tersebut merupakan landasan berpikir bagi kaum radikal untuk kemudian melakukan aksi-aksi yang menurut mereka tidak melanggar hukum. Melihat pendapat tersebut maka antiradikalisme bisa dikatakan sebagai gerakan yang melawan pendapat mengenai pemutlakan atau fanatisme terhadap suatu keyakinan. Ketika pendapat tersebut dikonstruksi oleh media, maka akan menghasilkan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis framing model Robert Entman (Lihat Gambar 3.1) dipinjam untuk mengetahui konstruksi dan pembedingkaian yang dilakukan oleh media siber. Sebagaimana diketahui dalam setiap kegiatan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki sifat yang subjektif, dan tentunya sebagaimana penelitian-penelitian kualitatif lainnya, besarnya populasi atau sampel bukanlah suatu hal yang utama atau bersifat esensial, sebab populasi dan sampling yang digunakan jumlahnya relatif sedikit. Sampel dalam penelitian ini bukanlah suatu elemen yang diukur. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Selain itu, tataran fokus penelitian ini juga merujuk pada bagaimana konstruksi media, yaitu *framing* dan pemilihan *angle* yang memperlihatkan pola dan preferensi dari media siber untuk mengenai pemberitaan tentang antiradical dan anti terorisme. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan dapat diidentifikasi mengenai bagaimana berita-berita yang berasal dari detik.com dan kompas.com merepresentasikan konstruksi media-media tersebut.

Dalam setiap penelitian, poin yang ditekankan dalam metode adalah penentuan unit analisis serta sumber-sumber data yang diperlukan secara spesifik. Unit analisis data dari tahap satu penelitian ini, yaitu :

1. Artikel Berita di detik.com dan kompas.com.
2. Caption foto.

Sedangkan unit analisis data dari wawancara dari akademisi dan praktisi sebagai tahapan penelitian kedua adalah pernyataan dari akademisi dan praktisi yang menjawab pertanyaan penelitian dan dalam lingkup fokus penelitian.

Fokus dan unit analisis data membutuhkan sebuah pisau analisis yang ditujukan untuk melakukan analisis data secara empiris. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis framing Robert Entmann.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam aspek hasil dan pembahasan berikut akan disajikan analisis beserta hasil diskusi terhadap dua portal media di atas :

Analisis pada Detik.com

Kemenag Akan Kerahkan 45 Ribu Penyuluh Cegah Penyebaran Paham Radikal



The screenshot shows a news article on the Detik.com website. The headline is "Kemenag Akan Kerahkan 45 Ribu Penyuluh Cegah Penyebaran Paham Radikal". The author is Isal Mawardi, and the article was published on Friday, October 25, 2019, at 19:56 WIB. There are 24 comments. The article includes a photo of Menteri Agama Fachrul Razi and a quote from Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid regarding the prevention of radicalism through curriculum and teacher training.

Define Problem : Permasalahan mengenai radikalisme di masyarakat sebagai bentuk ancaman yang serius. Dibutuhkan peran pemerintah untuk menangani hal tersebut, sehingga Kementerian Agama harus turun tangan.

Diagnose Causes : Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mudah meng'kafir'kan orang lain dan hal ini harus segera ditangani. Penjelasan ini terdapat dalam paragraph yang berbunyi "Menurut Zainut, radikalisme tergolong menjadi dua konteks, yakni keagamaan dan kebangsaan. Ia mencontohkan, paham yang tidak menerima dan menggolongkan 'kafir' kepada kelompok lain yang ajarannya berbeda maka hal itu termasuk radikalisme dari aspek keagamaan."

Menurut Zainut, radikalisme tergolong menjadi dua konteks, yakni keagamaan dan kebangsaan. Ia mencontohkan, paham yang tidak menerima dan menggolongkan 'kafir' kepada kelompok lain yang ajarannya berbeda maka hal itu termasuk radikalisme dari aspek keagamaan.

Make Moral Judgement : adanya ancaman terhadap harmonisasi bangsa. Sehingga paham radikal harus diberantas. Hal ini tampak pada paragraph yang berbunyi : "Muaranya tadi mengganggu harmoni kehidupan umat"

beragama, kedua, mengancam eksistensi negara kita. Karena mereka tujuannya ingin mengganti Pancasila," ujar Zainut.

"Muaranya tadi mengganggu harmoni kehidupan umat beragama, kedua, mengancam eksistensi negara kita. Karena mereka tujuannya ingin mengganti Pancasila," ujar Zainut.

Treatment Recommendation : Pada berita ini, solusi yang ditawarkan sudah terpapar dengan jelas di judul dan paragraph pertama yaitu "Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugasi Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi untuk menangkal radikalisme. Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, pencegahan berkembangnya paham radikal bisa dilakukan dari hulu, yakni dari kurikulum hingga pengajar

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugasi Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi untuk menangkal radikalisme. Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, pencegahan berkembangnya paham radikal bisa dilakukan dari hulu, yakni dari kurikulum hingga pengajar.

Penjelasan dari berita diatas bahwa pada berita tersebut dalam melakukan gerakan antiradikalisme, pemerintah memberikan mandate kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Solusinya adalah dengan menyebar penyuluh untuk menekan paham radikalisme di seluruh elemen masyarakat. Pembingkai yang dilakukan oleh detik.com melalui berita tersebut menekankan pada langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu turun langsung melalui Kementerian Agama.

Analisis pada kompas.com

Mahfud MD: Pemerintah Tangani Radikalisme, Tak Peduli Islam atau Bukan

The image is a screenshot of a news article from Kompas.com. The article title is "Mahfud MD: Pemerintah Tangani Radikalisme, Tak Peduli Islam atau Bukan". The author is identified as "Mahfud MD". The article is dated "31/10/2019, 21:57 WIB". The article features a photograph of several men, including Mahfud MD, who is wearing glasses and a patterned batik shirt. The article is displayed on the Kompas.com website, which has a navigation bar at the top with various categories like NEWS, TREND, HYPER, FOOD, MONEY, BOLA, TEKNO, SAINS, OTOMOTIF, LIFESTYLE, HEALTH, PROPERTI, TRAVEL, EDUKASI, JEO, and KOLOM. There are also social media sharing icons for Facebook and Twitter. A watermark "Iklan ditutup oleh Google" is visible on the right side of the article.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan **Mahfud MD** menegaskan pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam itu radikal.

Ia memastikan pemerintah menindak **radikalisme** tanpa melihat dari agamanya.

"Kita menangani orang-orang radikal tidak peduli Islam atau tidak," kata Mahfud usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama

Mahfud kemudian menjelaskan definisi radikalisme berdasarkan versi pemerintah. Menurut dia, radikalisme merupakan paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan.

Juga merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah.

Menurut Mahfud, orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.

Define Problem : Permasalahan radikalisme tidak hanya berasal dari agama Islam saja. Sehingga Mahfud MD menegaskan untuk memberantas semua paham radikal. Hal itu tampak pada paragraph berikut :

Ia memastikan pemerintah menindak **radikalisme** tanpa melihat dari agamanya.

Diagnose Cause : permasalahan mengenai radikalisme merupakan hal yang sangat serius dan bermaksud merubah ideology Negara, tanpa melihat latar belakang agama si pelaku. Hal ini tertera pada paragraph berikut :

Mahfud kemudian menjelaskan definisi radikalisme berdasarkan versi pemerintah. Menurut dia, radikalisme merupakan paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan.

Juga merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara dan berkonstitusi adalah salah.

Menurut Mahfud, orang Islam atau bukan, jika melakukan hal itu maka disebut radikal.

Make Moral Judgement : Mahfud MD mengajak masyarakat untuk tidak mendramatisasi deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah. Hal itu tampak dalam paragraph berikut :

Mahfud pun meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu.

Treatment Recommendation : Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk melakukan tindakan terhadap paham-paham radikal dan mengganti istilah radikalisme menjadi manipulator agama. Hal itu tampak pada paragraf berikut :

Saat membuka rapat terbatas sore tadi, Presiden Jokowi memerintahkan Mahfud MD dan jajaran menteri di bidang Polhukam untuk menangani paham-paham radikalisme.

Jokowi juga sempat mengusulkan agar orang yang dianggap radikal disebut sebagai manipulator agama.

Penjelasan : pada berita tersebut, konstruksi yang ingin ditekankan oleh kompas.com adalah usaha pemerintah melalui Menkopolkam Mahfud MD dalam menekan dan memberantas paham radikalisme. Konstruksi yang dibentuk oleh kompas.com adalah tidak menekankan pada aspek agama saja.

Konsep media siber dan perkembangan teknologi, di Indonesia khususnya, menjadi perhatian yang menarik karena tidak terlepas dari kultur masyarakat Indonesia itu sendiri. "Di dalam masyarakat informasi dewasa ini, yang di dalamnya komunikasi dan informasi menjadi bagian integral dari system kapitalisme lanjut, komunikasi dan informasi berkembang tanpa kendali, yang melampaui alam, sifat dan tujuan komunikasi itu sendiri (hypercommunication) sehingga menciptakan semacam kegalauan komunikasi dan kegalauan informasi." (Piliang, 2011 : 247). Konsep tersebut saat ini telah berada dalam tataran yang lebih komprehensif serta memberikan dampak yang signifikan di masyarakat. Perkembangan internet dewasa ini tampaknya memberikan beragam dampak sosial budaya, termasuk juga dampak politik. Internet memberikan pengaruh besar terhadap perubahan politik, bahkan bisa menghasilkan distabilitas politik (McNair, 2003 :225). Hal itu menunjukkan bahwa internet sebagai media online memberikan dorongan pada perubahan politik, termasuk pada perubahan politik di suatu negara. Dengan kata lain, internet membawa beragam implikasi pada politik dan kehidupan bernegara. Situasi tersebut muncul karena internet menjadi satu media di era modern yang memiliki kekuatan besar selain media-media lain yang ada. Signifikansi internet di atas tampaknya didorong oleh keunggulannya menggabungkan keunggulan dan kemampuan media lainnya dalam satu wilayah yang sama. Terry Flew (2002: 10) menjelaskan internet menggabungkan tiga keunggulan teknologi dari media, media sebelumnya, yaitu keunggulan teknologi komputer, isi media massa, dan teknologi komunikasi dan informasi. Keunggulan teknologis tersebut membuat internet menjadi salah satu media yang mampu memberikan dampak besar bagi perkembangan masyarakat, khususnya pada bidang politik dan pemerintahan.

Signifikansi dan pengaruh internet pada bidang politik dan pemerintahan ditunjukkan oleh kemampuan internet yang relatif mudah diakses, serta mendukung munculnya interaktivitas yang lebih baik antara komunikator dengan komunikan. Kenyataan tersebut membuat proses komunikasi antara komunikator dan komunikan berlangsung lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan proses komunikasi dengan media lain. Oleh karena itu, internet mengubah cara drastis semua arus informasi serta semua infrastruktur komunikasi di masa modern (Klang, 2008: 2456; Castell, 1996; 2001). Perubahan arus informasi yang revolusioner dewasa ini kemungkinan besar tidak hanya memunculkan perubahan pada arus informasi pada aspek sosial semata, tetapi juga perubahan pada aspek komunikasi politik di suatu negara. Dengan kata lain, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pesan serta pendapat kepada pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu, sementara pemerintah atau lembaga pemerintahan dapat menyampaikan tanggapan terhadap pesan tersebut dengan mudah. Nampaknya, model komunikasi tersebut menimbulkan arus informasi yang memungkinkan masyarakat

dan pemerintah menyampaikan beragam pendapat terkait dengan isu pemerintahan, sehingga diharapkan mendukung munculnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Beberapa poin temuan data serta bahan diskusi untuk menentukan framing yang dilakukan oleh dua media tersebut adalah :

1. Berfokus pada upaya Pemerintah.

Framing yang disajikan baik oleh detik.com maupun kompas.com dalam melakukan pemberitaan terkait kontra radikalisme sama-sama membingkai pada usaha dan kinerja pemerintah. Walaupun terdapat perbedaan, dimana detik.com berfokus pada Kementerian Agama sebagai 'aktor utama' dalam usaha menangkal radikalisme di masyarakat. Sedangkan kompas.com lebih *general* / umum dengan menghadirkan pemberitaan yang melibatkan BNPT, Kemenpolhukam hingga Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya gaya pemberitaan detik.com dan kompas.com memiliki 'warna' yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan, misalnya radikalisme ini.

2. Perbedaan pola pandang mengenai radikalisme.

Perbedaan pola pandang ini memberikan gambaran yang cukup menarik terhadap dua media informasi digital ini untuk diamati. Detik.com misalnya, memandang radikalisme lebih condong pada pembingkain factor agama. Aspek ini terlihat jelas dimana detik.com cenderung melakukan framing terhadap Kementerian Agama melalui Menteri Agama Fahrul Razi dalam menangani radikalisme dan terorisme di masyarakat. Detik.com juga memandang factor penting agama sebagai jalan untuk menangkal paham radikalisme yaitu dengan menyebarkan lagi aspek akidah dalam menghadang khilafah. Sedangkan kompas.com cenderung melihat radikalisme dalam aspek praktik di masyarakat. Artinya memandang radikalisme ketika sudah berada dalam tataran praktik terorisme di masyarakat. Sehingga pemberitaan di masyarakat cenderung melihat upaya BNPT dan Presiden dalam menangkal terorisme di Indonesia maupun dunia internasional yaitu ISIS.

3. Memiliki kesamaan dalam memandang peran media Sosial.

Dua media ini memiliki pembingkai yang sama dalam memandang peran media online di masyarakat. Detik.com dan kompas.com memandang media online juga merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam menyebarkan paham radikalisme. Sering sekali praktik-praktik terorisme di masyarakat diawali dari konsumsi terhadap media online sehingga individu tersebut terpapar paham radikal.

Melihat penjabaran diatas kita bisa mengetahui bahwa media siber dalam melakukan pemberitaan mengenai kontra radikalisme dan kontra terorisme memiliki aspek yang berlainan, namun tujuan akhir sama. Dua media yang diamati ini memiliki fokus yang sama-sama menekankan pada usaha pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat dalam melakukan deradikalisasi, sehingga paham-paham radikalisme di masyarakat dapat ditangkal dengan maksimal. Aspek lain yang juga tidak kalah penting berada dalam wilayah atribut budaya berupa penggunaan sebutan atau bahasa. bahasa terorisme dalam media lebih merujuk pada tindakan pelaku serta identitas mereka dari segi interaksi, afiliasi dan ideology. Media memang memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran akan informasi dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Namun aspek penting yang juga perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana cara media menyampaikan informasi tersebut, terutama dalam pembahasan mengenai terorisme. Penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan bahasa yang memberikan konstruksi tentang terorisme memberikan pengaruh yang sangat besar di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan mengenai terorisme di Indonesia lebih bersifat langsung dan memiliki gaya yang sama seperti tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pemahaman mengenai fenomena dan membahasakan dalam bentuk berita merupakan salah satu gaya media dalam berita. Apabila kemudian ditarik

dalam ranah riset kali ini, kita bisa melihat bagaimana media melakukan refocusing dalam subjek berupa terorisme. Selain itu ada sebuah simbolisasi dan labelling kepada kelompok tertentu yang berbasis kepada agama dan memiliki keyakinan kuat dalam setiap tindakannya. Hal ini tentunya memberikan fenomena tersendiri dalam diskusi yang membahas pemahaman radikal dan terorisme di Indonesia. Melalui penelitian ini kita dihadapkan pada sebuah temuan menarik yaitu bagaimana media melakukan konstruksi realitas dan simbolisasi pada terorisme melalui bahasa dan kalimat yang digunakan.

Penggunaan bahasa berupa “DPO”, “Afiliasi ISIS”, “Radikal”, “Afiliasi JAD, JI”, “Terorganisir” dan lain sebagainya, merupakan kata dan kalimat yang sering dilekatkan media kepada terduga teroris. Hal tersebut tidak salah karena memang sesuai dengan realitas yang ada, namun aspek yang cukup “menggelitik” adalah bagaimana media melakukan konstruksi dan simbolisasi dengan memanfaatkan psikologis masyarakat. Artinya, dalam hal ini media memang memiliki tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan di masyarakat, namun hal yang terjadi adalah kecenderungan masyarakat memunculkan stereotype terhadap individu dan kelompok tertentu. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah proses yang menarik di masyarakat terkait dengan membentuk literasi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana media melakukan edukasi mengenai pencegahan paham radikal. hal ini sesuai dengan usaha pemerintah dalam menanggulangi terorisme di masyarakat. Terlebih lagi seiring dengan pandemic yang sedang terjadi saat ini. Rawan untuk ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang berusaha melakukan aksi teror. Tekanan ekonomi akibat pandemic merupakan faktor utama seseorang bersedia melakukan apapun. Kondisi seperti itu yang memudahkan paham radikal masuk ke pemikiran seseorang. Apabila hal ini tidak dicegah, maka tidak menutup kemungkinan aksi-aksi teror akan terus terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberitaan di media digital / siber mengenai antiradikalisme dan antiterorisme lebih menekankan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Baik dalam lembaga Kementerian Agama hingga lembaga anti teroris yaitu Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Selain itu, media memiliki kemampuan untuk membentuk konstruksi di masyarakat. Penggunaan bahasa dan kalimat dalam pemberitaan yang merujuk pada terduga teroris, merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Media memang menggunakan hal tersebut karena memang sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Simbolisasi yang digunakan oleh media dengan membentuk konstruksi tertentu, memberikan dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Salah satunya adalah stereotype di masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan kewaspadaan di masyarakat. Aspek lain juga merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menanggulangi paham radikal yang ada di masyarakat. Perlu diketahui bahwa paham radikal hingga saat ini masih ada. Pencegahan dengan melakukan anti radikalisasi merupakan bagian dari tugas media juga, dan hal ini perlu untuk disinergikan antara media dengan pemerintah.

Pembingkaiian yang dilakukan oleh dua media tersebut memiliki kesamaan dengan menekankan upaya pemerintah dalam menangkal gerakan-gerakan radikalisme di masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka detik.com dan kompas.com dapat dikatakan memiliki gaya pemberitaan yang berbeda. kompas.com lebih memandang secara umum dan luas, sedangkan detik.com berfokus pada upaya lembaga tertentu karena menganggap radikalisme merupakan sebuah pandangan yang menitikberatkan pada aspek tertentu pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Besalur, R. Carles Pont-Sorribes, Aleix Martí. 2021. Perceived Credibility of Tweets by Opinion Leaders During the COVID-19 Pandemic in Spain. *International Journal of Communication* 15(2021), 5158–5185 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Coleman, R. Tong Chen. 2020. Forgotten Frames: Proposing the Concept of “Digressive Framing” Using Left-Out Frames in Chinese Media Coverage of Left-Behind Children. *International Journal of Communication* 14(2020), 6005–6025 1932–8036/20200005 USC Annenberg.
- cpps.ugm.ac.id/anti-radikalisme-prospek-demokrasi-oleh-muhadjir-darwin/*
- El – Nawawy, M. Hamas El-Masry. 2022. Normalizing Normalization: Emirati and Israeli Newspaper Framing of the Israel–Palestine Conflict Before and After the Abraham Accords. *International Journal of Communication* 16(2022), 1869–1892 1932–8036/20220005. USC Annenberg
- Ferre – Pavia, C., et al. 2018. Internet and Social Media in European Minority Languages: Analysis of the Digitalization Process *International Journal of Communication* 12(2018), 1065–1086 1932–8036/20180005. USC Annenberg.
- Flew, T. (2002). *New Media, Anintroduction*. Melbourne: Oxford University Press.
- Grosejl. D. 2021. Studying Personal Internet Access as an Infrastructure: A Qualitative Inquiry. *International Journal of Communication* 15(2021), 5116–5134 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Hinsley, A. Avery Holton. 2021. Fake News Cues: Examining the Impact of Content, Source, and Typology of News Cues on People’s Confidence in Identifying Mis- and Disinformation. *International Journal of Communication* 15(2021), 4984–5003 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Joseph-Vargo. C. Michelle A. Amazeen. 2021. Agenda-Cutting Versus Agenda-Building: Does Sponsored Content Influence Corporate News Coverage in U.S. Media?. *International Journal of Communication* 15(2021), 5186–5207 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Klang, M. (2008). Internet, Technology of. dalam Wolfgang Donsbach (editor) *The International Encyclopedia of Communication*. 2455-2460. Malden: Blackwell Publishing.
- McNair, B. (2003). *An Introduction to Political Communication*. (third edition). London: Routledge.
- Merten, L. Et al. 2020. News Won’t Find Me? Exploring Inequalities in Social Media News Use With Tracking Data. *International Journal of Communication* 16(2022), 1127–1147 1932–8036/20220005 Copyright ©. USC Annenberg
- O’Loughlin, B. 2020. Media Regime Disruption and the Conditions of Public Reflexivity. *International Journal of Communication* 14(2020), 6113–6132 1932–8036/20200005 USC Annenberg.
- Piliang, Yasraf A. (2011). *Dunia Yang Dilipat*. Matahari. Yogyakarta
- Prasetya, Arif B. (2019) *Analisis Semiotika Film dan Komunikasi*. Intrans. Malang
- Ruiz-Soler, J. 2020. European Twitter Networks: Toward a Transnational European Public Sphere *International Journal of Communication* 14(2020), 5616–5642 1932–8036/20200005 USC Annenberg.
- Schermann, A. Nicolle Etchegaray. 2021. News Frames in the Context of a Substantial Increase in Migration: Differences Between Media Platforms and Immigrants’ Nationality. *International Journal of Communication* 15(2021), 5051–5073 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Stubenvoll, M. *et.al.* 2021. Media Trust Under Threat: Antecedents and Consequences of Misinformation Perceptions on Social Media *International Journal of Communication* 15(2021), 2765–2786 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Tandoc, JR. Edson, C. *et al.* 2021. Developing a Perceived Social Media Literacy Scale: Evidence from Singapore. *International Journal of Communication* 15(2021), 2484–2505 1932–8036/20210005. USC Annenberg.
- Tanikawa, M. 2022. Explicating the Enigma Through the Cultural Lens: Media Stereotyping as a “Ritual”. *International Journal of Communication* 16(2022), 2015–2037 1932–8036/20220005. USC Annenberg
- Zhou, X. Matthew Matsaganis. 2019. Toward Reducing Institutional Digital Divides in the Media Industry: Examining Social Media Use in Ethnic Media Organizations *International Journal of Communication* 14(2020), 1004–1024 1932–8036/20200005 Copyright ©. USC Annenberg.